

**PERLINDUNGAN HAK MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM
MELALUI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Seminar Hasil
pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2021

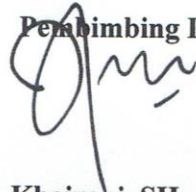
LEMBARAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HAK MEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM MELALUI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**
Nama : **KARTONI, SH**
NIM : **1920112050**
Program Studi : **MAGISTER ILMU HUKUM**

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Akhir
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dan
Dinyatakan Lulus Pada Hari Selasa, 3 Agustus 2021.

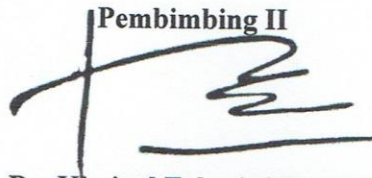
Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



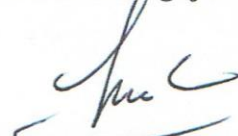
Dr. Khairani, SH., MH
NIP. 19621211 198901 2 001

Pembimbing II



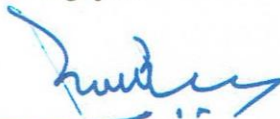
Dr. Khairul Fahmi, SH., MH
NIP. 19811113 201012 1 005

Komisi Penguji I



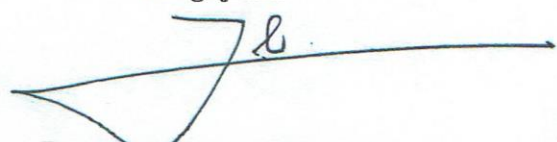
Dr. Yustim, SH., MH
NIP. 197106301998021002

Penguji II



Dr. Dian Bakti Setiawan, SH., MH
NIP.19720516 200003 1 002

Penguji III



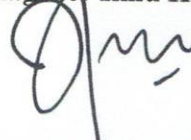
Dr. Jean Elvardi, SH., MH
NIP. 19611119 198901 1 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas**



Prof. Dr. Busyra Azheri, SH., MH
NIP. 19691118 199403 1 002

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Khairani, SH., MH
NIP. 19621211 198901 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KARTONI, SH

NIM : 1920112050

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya tulis ini dengan judul “ **Perlindungan Hak Memilih dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan**” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan ciplakan dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan dan sumbernya yang dicantumkan. Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 4 Agustus 2021

Hormat Saya,



KARTONI, SH
NIM. 1920112050

PERLINDUNGAN HAK MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM MELALUI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

(Kartoni, 1920112050, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Magister Ilmu Hukum, Halaman 266, 2021)

ABSTRAK

Hak memilih merupakan hak fundamental (*fundamental rights*) dan hak konstitusional (*constitutional rights*) yang harus dilindungi oleh negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Setiap Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau pernah kawin dan memenuhi syarat untuk memilih disebut Pemilih dan diberikan hak untuk memilih. Untuk dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu, setiap pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih dan telah memiliki KTP-el atau Surat Keterangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemutakhiran data pemilih bertujuan untuk memperbaharui data pemilih sehingga mampu memberikan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak memilih warga negara. Namun demikian, pemutakhiran data pemilih saat ini, belum mampu melindungi hak memilih warga negara dan daftar pemilih yang dihasilkan masih saja menimbulkan permasalahan. Pada Pemilu Tahun 2019, daftar pemilih tetap (DPT) harus mengalami perbaikan sebanyak tiga kali. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan pendaftaran pemilih dengan perlindungan hak memilih dan bagaimana perlindungan hak memilih dalam Pemilu melalui pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dengan metode *normatif-empiris* yaitu penelitian yang meneliti norma peraturan perundang-undangan, dan juga meneliti bagaimana norma tersebut dilaksanakan oleh pelaksana undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak pilih sebagai hak asasi mendasar/fundamental dan juga merupakan hak konstitusional warga negara dapat dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh negara melalui pendaftaran pemilih 1 (satu) kali ke dalam daftar pemilih. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi yang memadai yang mengatur secara tegas, tidak tersedianya anggaran dan sumber daya manusia yang cukup, masih tidak sinkronnya kebijakan pemanfaatan data kependudukan dan data pemilih antara KPU dengan Pemerintah, masih kurangnya kesadaran masyarakat dan belum terintegrasinya data kependudukan dengan data pemilih. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang perlu merevisi Undang-Undang Pemilu, pembentukan regulasi tentang pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pembentukan petugas permanen, pelaksanaan SIAK Terpusat terintegrasi dengan Sidalih dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci : Hak Memilih, Pemilihan Umum, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
**THE PROTECTION OF SUFFRAGE RIGHT IN ELECTIONS THROUGH
CONTINUOUS VOTER DATA UPDATES**

(Kartoni, 1920112050, Faculty of Law, Postgraduate Program, Andalas University, Master of Law Science, Pages 266, 2021)

ABSTRACT

The suffrage right is a fundamental right and constitutional right that must be protected by the state referred to in the 1945 Constitution. Every Indonesian citizen who has reached the age of 17 (seventeen) years or more, is married or has been married and who are eligible to vote are called voters and are given the right to vote. To be able to exercise their right to vote in an election, every voter must be registered in the voter list and have an ID card (e-KTP) or Certificate as stipulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Updating voter data aims to update voter data so that it can provide protection and guarantee the fulfillment of citizens' right to vote. However, the current updating of voter data has not been able to protect citizens' right to vote and the resulting voter list still creates problems. In the 2019 election, the permanent voter list (DPT) must be revised three times. This study examines the relationship between voter registration and the protection of the right to vote and how the protection of the right to vote in elections through continuous updating of voter data using the normative-empirical method is research that examines the norms of statutory regulations and also examines how these norms are implemented by the implements of the law. The results showed that the protection of the right to vote as a fundamental human right and also a constitutional right of citizens can be guaranteed, protected, and fulfilled by the state through voter registration 1 (one) time into the voter list. Continuous updating of voter data has not been carried out properly. This is due to the absence of adequate regulations that explicitly regulate, the unavailability of sufficient budget and human resources, the unsynchronized policy on the use of population data and voter data between the KPU and the Government, the lack of public awareness and the lack of integration of population data with data. selector. Therefore, legislators need to revise the Election Law, establish regulations regarding the implementation of continuous voter data updating, formation of permanent officers, implementation of Centralized SIAK integrated with Sidalih and increase public legal awareness.

Keyword : *Suffrage Right, General elections, Continuous Voter Data Updates.*

